

PRO-KONTRA PEREMPUAN DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF FEMINISME MUSLIM

Nilu Sastrawaty

Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

Email: nila.sastrawati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan mengkaji pandangan Qasim Amin, Aminah Wadud Muhsin, Fatimah Mernissi, dan Asghar Ali Engineer terkait faktor yang mewarnai pro kontra kepemimpinan politik bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang datanya bersumber dari kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa feminis muslim berpijak pada tafsir al Quran dan hadis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang prinsip kesetaraan Islam. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pemikiran feminis muslim tidak dapat dinafikan turut mewarnai dinamika pemikiran tentang peran perempuan dalam politik di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi sampai saat ini yakni; penafsiran teks agama, budaya patriarkhi, dan akses pendidikan bagi perempuan.

Kata Kunci: *Feminis Muslim, Perempuan, Politik*

Abstract:

This paper aims to examine the views of Qasim Amin, Aminah Wadud Muhsin, Fatimah Mernissi, and Asghar Ali Engineer regarding the factors that influence the pros and cons of political women leadership. This study uses a qualitative method whose data comes from library research. The results of this study indicate that Muslim feminists are based on the interpretation of the Koran and Hadith to obtain a comprehensive picture of the principle of Islamic equality. Indonesia, as a country where the majority of the population is Muslim, it is undeniable that Muslim feminist thought has contributed to the dynamics of thinking about the role of women in politics, as well as the challenges faced to date, namely; interpretation of religious texts, patriarchal culture, and access to education for women.

Keywords: *Muslim Feminists, Women, Politics*

PENDAHULUAN

Terdapat dua tema dalam pembahasan tulisan ini yakni; perempuan dan politik; dan feminis muslim. *Pertama*, perempuan dan politik berfokus pada realitas kebebasan perempuan untuk berpartisipasi politik termasuk kesempatan untuk menduduki posisi strategis dalam jabatan politik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peran negara menghadirkan undang-undang politik sebagai bentuk gerakan afirmasi belum memenuhi harapan.

Hal ini dapat dilihat pada hasil Pemilu 2019 menempatkan keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI, 20,5%/20,8% yang lolos di parlemen merupakan figur-figur perempuan yang berasal dari dinasti politik (Juniar;2020). Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengatakan pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dengan sejumlah alasan antara lain; pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik (Kemenko PMK:2021).

Muhammad Ihsan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI dalam Seminar Nasional “Kepemimpinan Perempuan di Indonesia” mengemukakan bahwa; Kualitas hidup perempuan di satu dasawarsa terakhir sudah membaik, perempuan Indonesia adalah sumber daya potensial yang apabila diberi kesempatan akan maju dan meningkatkan kualitasnya secara mandiri dan menjadi penggerak dalam dimensi kehidupan dan pembangunan bangsa. Namun Masih ada fakta kurang menyenangkan bagi perempuan seperti masih tinggi tingkat kekerasan pada perempuan, kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki, terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, kurangnya peran perempuan dalam lembaga publik yang lebih luas (seperti partisipasi di bidang politik dan jabatan strategis di bidang pemerintah) (PSW UGM:2017)

Permasalahannya adalah, masih adanya pro kontra terkait kepemimpinan perempuan khususnya dalam jabatan-jabatan strategis. Pada berbagai kajian dan penelitian menunjukkan adanya anggapan ranah politik bukan ranah bagi perempuan karena menyangkut kemampuan finansial, jaringan, popularitas, kecerdasan, dan perempuan dianggap tidak memiliki potensi tersebut. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim tidak terlepas dari diskursus peran perempuan dalam ranah publik sampai saat ini. Regulasi belum menjadi kunci utama yang menjamin kebebasan perempuan dalam politik sebab tantangan terberat adalah konstruksi pemikiran masyarakat yang mengangkat isu agama sebagai factor utama melegalisasi keterbatasan perempuan dalam aktivitas publik.

Lestari Meordijat dalam laman online MPR merilis hasil *Riset State of The World's Girls Report* (SOWTG) mengemukakan bahwa sebanyak 9 dari 10 perempuan percaya bahwa partisipasi politik itu penting, namun para perempuan itu juga mengakui adanya berbagai hambatan dalam proses partisipasi tersebut. Hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8% atau 120 anggota legislative perempuan dari 575 anggota DPR-RI. Persentase keterwakilan tersebut masih di bawah angka persyaratan 30% jumlah calon anggota legislatif perempuan pada saat parpol mendaftar menjadi peserta pemilu.

Data dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tahun Pemilu 2019 di Sulawesi Selatan sebanyak 3.178.466 orang pemilih perempuan,

2.994.754 orang pemilih laki-laki dengan selisih 183.692 orang. Data tersebut jika secara proporsional maka pemenuhan 30% keterwakilan perempuan di Sulawesi Selatan dapat terpenuhi. Afirmasi yang dilakukan meskipun mengalami peningkatan dari Pemilu 2014 (18%), namun keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif provinsi 29% (24 orang). Sulitnya mencapai nilai minimal 30% keterwakilan perempuan sampai Pemilu 2019 bukan hal yang tidak mungkin menjadi gambaran masalah akan dihadapi Kembali pada Pemilu 2024.

Kedua, feminis muslim adalah mereka yang berijtihad bahwa sistem patriarki yang ada selama ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip al-Quran tentang kesamaan dan keadilan gender. Feminis muslim menggunakan tafsir Alquran dan teks-teks agama lainnya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang prinsip kesetaraan Islam. Pada defenisi lain, Badran menjelaskan bahwa feminis muslim berbeda dengan feminis sekuler, yang mendasarkan penolakan mereka terhadap sistem patriarki pada argumen modernis bukan pada interpretasi Alquran dan teks-teks agama lainnya. Demikian pula, feminis Muslim menggunakan argumen modernis untuk mendorong perempuan meninggalkan rumah (ruang publik) dan mendapatkan hak politiknya (Badran:2009, M. Noor Hartsuddin:2015)

Istilah feminisme Islam mulai muncul dalam berbagai literatur pada awal abad ke-20, misalnya tulisan Thomas Philipp, *Feminism and Nationalist Politics in Egypt* tahun 1978, memotret gerakan feminisme Islam di Mesir akibat pengaruh Revolusi Mesir tahun 1919. Dia juga menyebutkan sejumlah tokoh pemikir pembaruan Islam, seperti Rifa'ah Rafi al-Tahtawi (1801-1873), Qasim Amin (1865-1908), Muhammad Abduh (1849-1905) yang menggugat pemahaman keislaman yang merendahkan harkat perempuan sehingga menyebabkan kemunduran dan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Tulisan itu juga merekam aktivitas feminis Islam, Huda Sya'rawi, pendiri Organisasi Perempuan Mesir tahun 1923 (Musda Mulia; 2022).

Eksistensi pemikiran gerakan feminisme tidak serta merta dapat diterima masyarakat. Terdapat dua pandangan dalam melihat "feminisme" dalam Islam. Pertama; Pihak yang menolak atau tidak menyetujui karena adanya anggapan bahwa gerakan ini merupakan produk Barat, tidak sesuai dengan syariat Islam bahkan dapat merusak akidah umat Islam. Pandangan kedua, mendukung gerakan ini dengan alasan bahwa gerakan feminis merupakan upaya memperjuangkan keadilan hak dan kewajiban perempuan di tengah masyarakat sehingga tidak memperoleh diskriminasi dari laki-laki (Nindi:2022).

Pro kontra terkait kepemimpinan perempuan khususnya dalam jabatan-jabatan strategis tidak terlepas dari pemikiran kebolehan perempuan mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Pemikiran ini terkonstruksi pada perempuan sebagai sosok yang lemah, dan kurang cerdas, yang tentu saja sangat bertentangan dengan teks-teks al Quran dan hadis.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Feminisme; Gerakan Perjuangan Perempuan

Gerakan feminisme berkembang pada hampir seluruh negara dengan teori dan kerangka kerja yang berasal dari Barat. Hal ini menjadi salah satu alasan sehingga penerimaan gerakan feminis di Indonesia mengandung pro dan kontra dalam masyarakat. Feminisme merupakan sebuah pemahaman komprehensif tentang keadilan berbasis gender yang bisa menjadi pijakan untuk pemikiran, gerakan, maupun kebijakan. Feminisme dapat dikelompokkan menjadi tiga spektrum, yakni sebagai gerakan sosial, alat analisis, dan ilmu pengetahuan, dan ketiganya saling melengkapi. Feminisme sebagai pemikiran berpijak pada pengalaman perempuan atau realitas historis yang mempengaruhi cara pandang perempuan terhadap suatu situasi dan kondisi. Tak dapat dinafikan bahwa pengalaman perempuan pada hampir seluruh belahan dunia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, termarginalkan, dan ter subordinasi. Realitas ini membangun kesadaran sebagian perempuan untuk keluar dari situasi tersebut dan menuntut persamaan hak sebagaimana hak yang diperoleh laki-laki.

Secara umum gerakan perjuangan feminisme barat dengan varian pemikiran yang mempengaruhi gerakan feminis di dunia, dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 1
Feminisme Barat dan Varian Pemikirannya (Ritzer:2010)

Teori feminis dalam menjawab pertanyaan “apa peran perempuan?”	Perbedaan jawaban dari teori yang menjelaskan “Mengapa situasi perempuan seperti itu?”	
Pengalaman yang dihadapi perempuan dalam sejumlah situasi yang berbeda dengan laki-laki	PERBEDAAN JENDER	Feminisme Kultural, Institusional, Eksistensi, dan Fenomenologi
Posisi perempuan pada berbagai situasi tak hanya berbeda, tetapi juga kurang beruntung atau tak setara dengan posisi lelaki	KETIMPANGAN GENDER	Feminisme liberal, Marxian
Perempuan bukan hanya dalam situasi tertindas, tidak setara, terkekang, ter subordinasi, dibentuk, dan disalahgunakan oleh lelaki	PENINDASAN JENDER	Feminisme Psikoanalisis, Feminisme Radikal, Feminisme Sosialis

Pengalaman sosial perempuan berada dalam situasi ketimpangan, dan penindasan.	PENINDASAN STRUKTURAL	Feminisme Sosialis, Teori Interseksional
---	-----------------------	--

Tabel di atas menunjukkan isu-isu krusial dalam berbagai situasi dan kondisi yang dialami perempuan sebagai realitas sosial, dan dasar perjuangan gerakan feminisme. Feminisme kultural memandang bahwa negara membutuhkan nilai-nilai perempuan seperti kerjasama, perhatian, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Feminisme Liberal berfokus pada isu perjuangan gender, kebebasan dan kesetaraan. Menurut Mansor Fakih, aliran ini muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan, dan nilai moral serta kebebasan individu. Dalam mendefinisikan masalah perempuan, struktur dan sistem bukan sebagai fokus masalah, tetapi terletak pada kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) yang berakar pada rasionalitas, dengan konsep kesempatan yang sama dan hak yang sama (Mansour Fakih:2008). Salah satu tokoh feminisme liberal Naomi Wolf menganggap bahwa feminisme liberal sebagai “feminisme kekuatan” dan menjadi solusi bagi perempuan. Saat ini perempuan memiliki kekuatan baik dari segi pendidikan, pendapatan, sehingga persamaan hak perlu diperjuangkan (Herien:2009).

Perjuangan feminisme radikal berfokus pada pemulihan kesadaran perempuan akan nilai dan kekuatan mereka sendiri, dan menolak tekanan patriarki yang melihat perempuan sebagai anggota yang lemah, tergantung, dan kelas dua. Membangun kesadaran diri dengan memperkuat solidaritas sesama perempuan; membangun semangat persaudaraan, saling percaya, saling membela sehingga secara bersama dapat mengaktualisasikan diri pada aktivitas publik. Feminisme radikal percaya bahwa ketika perempuan aktif dalam kehidupan politik, maka akan terjadi perubahan dan kesempatan yang lebih terbuka, karena kebijakan-kebijakan publik disusun dan ditetapkan dalam arena politik. Perempuan memiliki kesempatan untuk melawan ketidaksetaraan sosial, budaya, dan politik sebagaimana yang terjadi selama ini.

Tokoh feminis sosialis menyatakan bahwa masyarakat mengalami pergeseran berangsur-angsur dari patriarki privat. Seorang individu laki-laki mendapatkan keuntungan dari subordinasi dari perempuan dalam rumah tangga menuju patriarki publik di mana perempuan memiliki akses dalam lapangan kerja berupah, lembaga-lembaga negara dan budaya, namun pada kenyataannya perempuan tetap tersubordinasi.

Feminis sosialis berpendapat bahwa masyarakat secara bertahap akan mengalami pergeseran patriarki privat. Laki-laki mendapat manfaat dari fakta bahwa perempuan dalam rumah tangga berada di bawah patriarki publik di mana perempuan memiliki akses dalam bidang pekerjaan dengan memperoleh upah baik pada lembaga pemerintah maupun swasta, tetapi perempuan tetap tersubordinasi dalam situasi yang dihadapi.

Mencermati gerakan feminisme barat bahwa permasalahan yang dihadapi perempuan pada dasarnya pada dua hal yakni; tantangan eksternal yaitu adanya upaya

mempertajam perbedaan secara timpang, dan tantangan internal yakni membangun kesadaran perempuan terhadap potensi yang dimiliki sebagai kekuatan bagi pengembangan dirinya.

B. Kebangkitan Gerakan Feminisme Islam

Al Quran dan hadis merupakan sumber utama ajaran Islam sebagai pedoman hidup umat muslim yang mengandung nilai-nilai universal dan meliputi; nilai kemanusiaan, keadilan, kemandirian, kesetaraan dan sebagainya, dan menolak perbedaan atau perlakuan diskriminasi dengan alasan apapun.

Mansour Fakih menjelaskan terkait identifikasi agenda masalah agama dan gender. Pertama, Penafsiran yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi dan tidak berkeadilan. Sejumlah ayat al Quran yang mendukung pandangan bahwa perempuan tidaklah subordinasi terhadap kaum laki-laki; antara lain dalam surah al Hujarat ayat 14;

“Sesungguhnya telah Aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan dan Aku jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku agar kalian lebih saling mengenal; sesungguhnya yang mulia diantara kalian adalah yang paling takwa”.

Kedua, Konsekuensi dari subordinasi merambah pada persoalan waris dan kesaksian dimana perempuan mendapat separuh dari laki-laki. Mencermati hal ini, perlu dilakukan analisis konteks sosial dimana konsep keadilan bukan terletak pada “angka” melainkan semangat keadilan. Ketiga; Tradisi penafsiran Islam yang tidak berperspektif gender, sehingga perempuan tidak memiliki hak memproduksi maupun reproduksi (Mansour Fakih :2008).

Agama dan gender sebagaimana dikemukakan Mansour Fakih sesuai dengan agenda yang diusung kelompok feminis muslim yang mengusung gerakan feminisme Islam. Lahirnya Feminisme Islam merupakan respon dari gerakan feminisme barat yang dianggap gagal dalam konsep perjuangannya akibat adanya kecenderungan menjadikan beban wilayah domestik. Konsep perjuangan feminisme Islam berfokus pada ranah sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik tanpa mengabaikan peran domestiknya. Islam sangat menjunjung kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Sejumlah ayat dalam al Quran dan hadis menguatkan betapa Islam tidak memberikan pembeda apapun atas laki-laki dan perempuan.

Abdul Mustaqim, merumuskan ciri-ciri dari feminisme Islam sebagai berikut;

1. Feminisme Islam bersandar kepada agama Islam dan ajarannya. Al Quran dan hadis sebagai rujukan tertinggi, serta perilaku Rasulullah menjadi contoh dalam melakukan gerakan.
2. Feminisme Islam menekankan keseimbangan, dimana laki-laki dan perempuan sebagai mitra, bukan sebagai musuh atau lawan (rival). Sebagai mitra, laki-laki dan perempuan dapat saling membantu satu sama lain secara harmonis dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.
3. Feminisme Islam memandang ajaran Islam secara integral dan menyeluruh. Al Quran dan tradisi Islam yang muncul dalam sejarah, dijadikan sebagai pisau analisis

dalam memecahkan persoalan yang dihadapi, dan harus tetap mempertimbangkan konteks sosio-kultural saat itu (Warits:2016).

Jika berbicara tentang pemikir muslim tentang feminisme, gerakan feminis memiliki lima tipologi perspektif yang berbeda tentang isu-isu perempuan: *Pertama*, Tipologi dimana perempuan dipandang tidak peduli haknya dirampas oleh laki-laki, oleh karena itu kesadaran perempuan harus dibangkitkan. *Kedua*; Para reformator mempertanyakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah perbedaan teks dan interpretasi. Mengkritik dan membangun interpretasi tradisional. *Ketiga*, Transformasionis, yaitu pendekatan yang diterapkan secara hermeneutika terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang memisahkan ayat-ayat *muhkamat* dan *mutasabiha*. keempat; Rasionalis menggunakan sikap adil dalam pendekatan rasionalis mereka percaya bahwa Allah itu adil, pengasih dan penyayang, sehingga kata-katanya harus dipahami sesuai dengan sifat-sifatnya. Kelima; Rejeksionis, Pendekatan ini meremehkan dan berani melakukan terobosan dalam menyikapi ayat-ayat Al-Qur'an (Tohari:2021).

Gerakan feminisme Islam tidak terlepas dari peran feminis muslim yang memberikan kontribusi pemikiran, serta turut mempengaruhi perspektif pemberdayaan perempuan dalam ranah publik termasuk dalam ranah politik. Beberapa pemikiran tokoh feminisme muslim akan diurai dalam tulisan ini, antara lain Qasim Amin dari Mesir, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia, Fatima Mernissi dari Maroko, dan Asghar Ali Engineer dari India.

1. Qasim Amin

Qasim Amin adalah tokoh feminis muslim pertama yang lahir pada bulan Desember 1865 di Tarah, Alexandria (Mesir). Qasim mampu menyelesaikan studi universitasnya dalam waktu yang relatif singkat. Di antara guru-guru yang dikaguminya di Al-Azhar adalah Muhammad Abduh. Dia menerima banyak panutan untuk berpikir kritis dari guru favoritnya. Karena kecerdasannya, Qasim Amin kemudian berkesempatan melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Montpellier di Paris, Prancis. Setelah kembali ke Mesir, Qasim Amin bekerja di Dewan Deputi dan kehakiman. Ia tinggal di Kairo hingga wafatnya pada 22 April 1908. Karya-karyanya yang menginspirasi perempuan untuk bangkit antara lain *Tahrir al-Mar'ah* (1900) dan *al-Mar'ah al-Jadidah* (1911). Kedua karya itulah yang kemudian menginspirasi banyak feminis muslim untuk memperjuangkan kebebasan perempuan hingga saat ini. Qasim Amin adalah salah satu feminis muslim yang memelopori gagasan pembebasan muslimah melalui karya-karyanya. Qasim Amin mendasarkan gagasannya pada keterbelakangan umat Islam, yang diyakininya karena kesalahan persepsi dan perlakuan terhadap perempuan (Qasim Amin:2003).

2. Aminah Wadud Muhsin

Aminah Wadud Muhsin adalah pemikir feminis kelahiran Malaysia, menyelesaikan studinya dari sekolah dasar hingga Pendidikan tinggi di Malaysia. Meraih gelar sarjana dari Internasional University, gelar magister dari University of Michigan USA tahun 1989

dan gelar Phd dari Harvard University. Saat ini sebagai professor di Departemen Filsafat dan Study Agama di Commonwealth University di Virginia. Buku *Inside the Gender Jihad* diterbitkan Reformasi Wanita dalam Islam (Amina Wadud:1993).

3. *Fatima Mernissi*

Fatimah Mernissi adalah seorang Muslim Maroko. Kini ia bekerja sebagai profesor di Institut Riset Ilmiah, Universitas Muhammad V Rabat (Maroko). Ia banyak menulis, baik berupa buku maupun artikel yang ditulis dalam bahasa Prancis. Beberapa karyanya telah diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Di antara karyanya adalah *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, (1975). Buku ini merupakan disertasinya yang dipertahankan di Brandeis University Amerika Serikat tahun 1973. Bukunya yang lain adalah *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women and Islam* (1991). Buku lain yang sebenarnya merupakan terjemahan dari buku yang sama adalah *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (1991).

4. *Asghar Ali Engineer*

Asghar Ali Engineer dilahirkan di Rajasthan (dekat Udaipur, India) tahun 1939. Ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang teknik sipil dari Vikram University (Ujjain, India). Pengetahuan agamanya diperoleh dari ayahnya yang Syiah. Ia adalah seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) yang mempunyai perhatian besar terhadap tema-tema pembebasan dalam Alquran. Ia pernah menulis artikel yang berjudul "*Toward a Liberation Theology in Islam*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "Islam dan pembebasan". Adapun bukunya yang berkaitan dengan masalah perempuan adalah *The Rights of Women in Islam* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (1994). Masih banyak karyanya yang lain yang menyuarakan keadilan dan pembebasan bagi perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang datanya bersumber dari kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Tahapan dalam studi Pustaka ini meliputi; menyiapkan alat yang akan digunakan; menyiapkan sumber-sumber data berupa buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu, mencatat sumber data yang diperoleh. Analisis data menggunakan *content analysis* dengan berfokus pada pemikiran tokoh feminisme muslim terkait eksistensi perempuan dalam politik yakni pemikiran Qasim Amin, Aminah Wadud Muhsin, Fatimah Mernissi, dan Asghar Ali Engineer .

HASIL DAN DISKUSI

Pertanyaan mendasar ketika memperbincangkan identitas gender perempuan adalah “perempuan?, perempuan adalah seorang ibu bagi anaknya, istri bagi suaminya, dan sejumlah label lain dimana dalam pernyataan tersebut tidak menyebutkan bahwa perempuan memiliki identitas sendiri. Perempuan memiliki hak-hak yang melekat dan hanya perempuan sendiri yang mengetahui apa yang dibutuhkan.

Merangkum dalam berbagai hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan isu-isu perempuan dan politik dan dikaitkan dengan perspektif feminis muslim sebagai berikut;

1. Penafsiran teks-teks agama

Isu kekuasaan/kepemimpinan dalam Islam menjadi kontroversi yang terus berlanjut hingga saat ini. Bagi kelompok ulama moderat, mereka melihat tidak ada yang menghalangi perempuan untuk menjadi pemimpin. Pandangan ini menunjuk pada beberapa perempuan yang berhasil memimpin dengan baik. Namun, alasan-alasan yang dikemukakan masih dianggap lemah, apalagi kita dihadapkan pada penafsiran teks Al-Qur'an dan Hadits yang dianggap bagi sebagian orang menentang kepemimpinan perempuan.

Menurut Mernissi, pemahaman kaum muslimin sebelumnya tentang kedudukan wanita dalam hadits Nabi sangat berpengaruh terhadap citra wanita yang sebenarnya sangat tinggi. Citra yang telah tertanam dalam masyarakat Islam ini harus segera diubah melalui pendekatan sosio-historis. Mernissi membuat ulasan tentang sumber kesalahpahaman persepsi tersebut. Ternyata akar permasalahan ini adalah penyebaran hadis “palsu”, yang kemudian dijadikan sarana untuk melegitimasi peran laki-laki untuk menegaskan keunggulannya. Mernissi mendorong umat Islam untuk memahami dan mempelajari lebih kritis hadits Nabi tentang perempuan sehingga perempuan dapat mengambil tempat yang selayaknya dalam kehidupan keluarga serta dalam peran lain dalam masyarakat.

Perdebatan para ulama mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi kepala pemerintahan. Satu pihak dari mereka mengatakan, perempuan boleh saja menjadi kepala negara, karena Islam telah memberi hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki hak politik untuk memimpin sebuah negara. Pihak lain menolak jabatan kepala negara dipimpin seorang perempuan, karena ada hadis yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan semacam itu. Mernissi berkesimpulan bahwa alasan mengizinkan perempuan menduduki jabatan kepala negara lebih bisa diterima jika mengacu pada nash-nash yang sah dalam al Quran.

2. Patriarkhi

Asghar berpendapat bahwa meskipun dalam al Quran menempatkan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki, namun kemuliaan tersebut dibatasi oleh patriarki yang mengakar dalam kehidupan berbagai masyarakat. Patriarki dimaknai sebagai sistem sosial yang memandang laki-laki sebagai otoritas sentral yang paling penting dalam organisasi sosial; Sosok ayah memiliki otoritas atas perempuan, anak-anak, dan

harta benda. Sistem ini secara implisit melembagakan keistimewaan laki-laki serta mensyaratkan subordinasi bagi perempuan. Patriarki adalah pembagian kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki memiliki kelebihan dalam satu atau lebih hal, seperti menentukan keturunan (keturunan dan nama keluarga secara eksklusif atau patrilineal), hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, dan partisipasi dalam status publik, pekerjaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin.

Bentuk-bentuk patriarki yang berakar dari budaya lokal dinarasikan bahwa pemimpin harus laki-laki karena fisik dan karakter laki-laki yang dianggap kuat dan tegas; perempuan tidak perlu berpolitik karena dunia politik dianggap wilayah yang tidak tepat bagi perempuan karena dunia politik dianggap kotor dan haus dengan kekuasaan; tugas perempuan melayani laki-laki; perempuan sebagai perhiasan politik, perempuan hanya sekedar dijadikan aksesoris politik, misalnya dalam kampanye untuk mendongkrak perolehan suara khususnya dari pemilih kaum muda; perempuan sebagai objek karena perempuan dianggap sebagai warga kelas dua di bawah laki-laki; perempuan tidak vocal, vokalisasi perempuan dalam politik dianggap hanya sayup-sayup dan tidak memberi warna dalam percaturan politik (Rosida:2009).

Menghapus berbagai stigma bagi perempuan bukan hal yang mudah. Asghar mengakui bahwa dalam khazanah tafsir terdapat pendapat-pendapat yang berempati terhadap perempuan, tetapi pendapat ini cenderung kalah populer dibandingkan hadis-hadis misogini yang telah terkonstruksi di masyarakat.

3. Pendidikan

Qasim Amin mengangkat tentang pentingnya pendidikan perempuan setelah melihat situasi perempuan di Mesir. Dengan gagasan emansipasi, Qasim Amin ingin membebaskan perempuan, agar mereka memiliki kebebasan untuk berpikir, berkeinginan dan bertindak dalam kerangka ajaran Islam dan dapat mendukung standar moral masyarakat. Kebebasan dapat mendorong orang maju dan berbalik menuju kebahagiaan. Menurut Qasim Amin, perlu dilakukan perubahan, karena menurutnya tidak mungkin maju tanpa perubahan. Syariah menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam hal tanggung jawab mereka di dunia dan di kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, tidak ada diskriminasi dalam lingkup kehidupan sosial, tetapi jika seorang perempuan melakukan kejahatan, hukum tidak membebaskannya atau menganjurkan pengurangan hukuman (Qasim Amin:2003).

Qasim Amin ingin menunjukkan bahwa kebebasan perempuan dalam berpikir, berkeinginan, dan bertindak berada dalam dua posisi penting yakni; sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab memelihara norma agama dan norma sosial, dan sebagai individu yang mampu meproteksi dirinya atas konsekuensi dari setiap tindakannya.

Al Quran menegaskan dalam surah al Mujadalah ayat 11;

... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Pentingnya memiliki bekal ilmu pengetahuan ditegaskan dalam Islam dengan menempatkan orang-orang yang berilmu pada kedudukan yang tinggi. Eksistensi ilmu pengetahuan bagi individu digunakan untuk menemukan hakikat kebenaran, pengelolaan sumber daya alam untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Gerakan feminis yang awalnya populer di negara barat merupakan gerakan perjuangan perempuan berdasarkan pengalaman pada situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Perkembangan feminisme yang demikian pesat dan menimbulkan varian-varian mazhab pemikiran pada satu sisi berkontribusi dalam mengungkap ketimpangan-ketimpangan yang dialami perempuan. Tetapi di sisi lain, keberadaan feminisme barat tidak serta merta diterima masyarakat muslim akibat beberapa pandangan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kebangkitan feminisme muslim Qasim Amin, Aminah Wadud Muhsin, Fatimah Mernissi, dan Asghar Ali Engineer, turut mewarnai pro kontra kepemimpinan politik bagi perempuan di Indonesia melalui penafsiran teks agama (al Quran dan Hadis), budaya patriarkhi, dan pentingnya Pendidikan bagi perempuan .

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fizahrin, Nindi dkk, *Feminisme dalam Islam Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kota Ambon*, Jurnal Al Muqaranah, Vol 1, Nomor 1 September 2022
- Amin, Qasim, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki- laki, Menggurat Perempuan Baru* Alih bahasa Syariful Alam dari *The New Woman: A Document in the Early Debate of Egyptian Feminism*, Yogyakarta: Ircisod, 2003
- Annova, Fauzana, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Bandung; Media Sains Indonesia 2022
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Alih bahasa oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf dari *“The Rights of Women in Islam”*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994
- Fakih, Mansour *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar; Jogjakarta, 2008
- Laraswanda, Juniar Umagapi , *Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang* ; Jurnal Kajian, vol. 25, No. 1, Tahun 2020

Muhaimin, Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung: PT Trigenda Karya, 1993

Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an and Woman*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti SDN. BHD, 1993

Pustpitasari, Herien, *Teori Gender dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga* UII, Yogyakarta, 2009

Ritzer, George, *The Post Modern Sosial Theory* (Juxtapose research and Publikation Studi Club, 2010

Tiur, Rosida Manurung, *Ketidakberpihakan Jargon Politik Terhadap Perempuan di Indonesia*, Jurnal Sosioteknologi Edisi 16, 8 April 2009

Tohari, Achmad dan Dian Pramodya Cahyani, *Evaluasi Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita dalam Islam*, Jurnal El Banat Vol 11 No. 22, 2021

Warits, Abdul, *Reorientasi Gerakan Feminisme Islam; Sebuah upaya membangun kesetaraan perempuan*, Fikrotuna: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, 2016

<https://muslimahreformis.org/beranda/wpcontent/uploads/2022/09/Feminisme-Islam-di-Indonesia.pdf>

<https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>

<https://psw.ugm.ac.id/2017/09/18/kepemimpinan-perempuan-di-indonesia/>,